

KAJIAN TENTANG FUNGSI SISTEM INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (SIPPD) DALAM PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN POSO

Agung Laksana Jamal¹, Haerul Anam dan Moh. Ahlis.Djirimu²

agung.jamal@gmail.com

¹Mahasiswa Program Studi Magister Perencanaan Wilayah Pedesaan Pascasarjana Universitas Tadulako

²Dosen Program Studi Magister Perencanaan Wilayah Pedesaan Pascasarjana Universitas Tadulako

Abstract

This study aims at determining the differences before and after use of Information System for Regional Development in the process of development planning in Poso district. This is a descriptive, qualitative and quantitative research with 43 (forty-three) people as the total number of population, and the total sample is 43 people selected by using census sampling technique. The data were collected through questionnaires and interview guidelines. The analysis of the data is descriptive quantitative and qualitative. The indicators used are the number of proposals that followed, the percentage of the consistency of the planned programs and activities and percentage of evaluated program and activities. The results show that there were significant differences after the use of SIPPD. This is shown by the results of difference test with t value of each indicator is the number of followed proposals 3.954, consistency percentage of planned programs and activities is 12.610, the percentage of evaluated programs and activities is 17.048 greater than the t table value 2.018. The study also suggests that it is needed to develop a system that suits the needs so that it can facilitate the preparation of important documents and development plans for each agency allocating a budget for increasing the capacity of SIPPD admin and providing cost consequences as motivation in the work.

Keywords: Development Planning and Information System Local of Development Planning

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan daerah dalam jangka waktu tertentu. Para pemangku kepentingan yang terlibat dapat digolongkan menjadi 3 domain yaitu lembaga pemerintahan yang terdiri dari eksekutif dan legislatif daerah, swasta yaitu pelaku-pelaku dunia usaha baik perorangan maupun lembaga dan masyarakat baik perorangan maupun kelompok. (RPJMD Kabupaten Poso)

Perencanaan tidak lain dari susunan (rumusan) sistematis mengenai langkah (tindakan-tindakan) yang akan dilakukan di masa depan, dengan didasarkan pada

pertimbangan-pertimbangan yang seksama atas potensi, faktor-faktor eksternal dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan, proses perencanaan merupakan sebuah proses yang dilakukan dalam rangka mencapai sebuah kestabilan, sehingga setiap aktivitas yang ada di dalamnya merupakan usaha yang dilakukan memiliki titik fokus untuk mencapai satu kondisi keseimbangan dalam konteks *problem solving*, *future oriented* dan *resource allocation*. Abe (2001). Untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perlu diperhatikan fungsi-fungsi dari perencanaan pembangunan. Fungsi perencanaan pembangunan mencakup sebagai berikut :

- 1) Dengan perencanaan diharapkan terdapatnya suatu pengarahan kegiatan,

adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan pembangunan.

- 2) Dengan perencanaan dapat dilakukan suatu perkiraan potensi-potensi, prospek-prospek perkembangan, hambatan serta resiko yang mungkin dihadapi pada masa yang akan datang.
- 3) Perencanaan memberikan kesempatan untuk mengadakan pilihan yang terbaik.
- 4) Dengan perencanaan dilakukan penyusunan skala prioritas dari segi pentingnya tujuan.
- 5) Perencanaan sebagai alat untuk mengukur atau standar untuk mengadakan pengawasan evaluasi (Arsyad, 1999).

Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) adalah merupakan sebuah sistem besar yang mendukung proses perencanaan pembangunan secara utuh, mulai dari proses perencanaan, pengendalian, dan evaluasi. Untuk itu, dalam proses pengembangan dan implementasinya perlu dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan dan kondisi yang ada (<http://bappeda.bonebolango.org/produk-9-sistem-informasi-perencanaan-pembangunan-daerah.html>).

Implementasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah melibatkan:

- BAPPEDA Kabupaten/Kota
- SKPD Kabupaten/Kota
- Kecamatan
- Pemangku kepentingan lainnya: Masyarakat Umum, Organisasi Masyarakat/Profesi, dan LSM.

Pengembangan dan Implementasi SIPPD ini pun, dapat dilakukan secara penuh ataupun bertahap sesuai kebutuhan, kondisi dan kesiapan-kesiapan yang ada baik infrastruktur maupun sumber daya manusia.

SIPPD dikembangkan dalam model portal/website yang berjalan di internet. Beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dengan model portal ini adalah:

- 1) Proses koordinasi dapat dilakukan dengan lebih baik (ada forum koordinasi/komunikasi pada semua pihak yang terlibat, dapat memantau kecamatan, dan SKPD saat melakukan aktifitas pemasukan data).
- 2) Pengendalian data Musrenbang (usulan kecamatan, maupun SKPD) dapat dilakukan lebih baik karena bersifat terpusat.
- 3) Sinkronisasi data dapat dilakukan secara cepat, karena data yang ada adalah bersifat *online*.
- 4) Pemrosesan data dapat dilakukan dengan lebih cepat karena data yang ada adalah bersifat *online*.
- 5) Dapat bekerja sama dengan lebih cepat, karena dapat dilakukan secara bersamaan (*multi-user*).
- 6) Dapat melakukan pemrosesan data dengan lebih leluasa (24 jam sehari selama seminggu, dan dapat dilakukan di mana saja selama ada koneksi internet).

Beberapa fitur lainnya dalam SIPPD ini, adalah:

- 1) Materi yang ada dalam portal tidak hanya bersifat substansi perencanaan pembangunan daerah yaitu sinkronisasi dan harmonisasi program dan kegiatan pembangunan, akan tetapi juga terdapat materi yang bersifat koordinasi dan komunikasi antar stakeholder yang ada. Dengan adanya fasilitas tersebut, pada umumnya sangat membantu dalam proses Musrenbang RKPD.
- 2) Dikembangkan dengan model *time-frame process*, yakni proses Musrenbang dari awal sampai akhir disajikan dalam bagan proses berdasarkan waktu. Dengan model ini setiap pengguna sistem, akan tahu posisinya sekarang di mana dan harus mengerjakan apa. Dengan model ini juga, sejarah perubahan data akan tetap terjaga dari waktu ke waktu.

Materi yang didukung, tidak hanya terbatas data-data tabel program dan kegiatan, tetapi juga mendukung data-data

narasi maupun grafis. Dengan kelengkapan materi tersebut, maka proses penyusunan dokumen perencanaan menjadi lebih mudah karena ada arahan-arahan yang bersifat kebijakan.

Semenjak diberlakukannya Undang Undang nomor 25 tahun 2004, mekanisme Perencanaan Pembangunan telah dilakukan. Hanya saja sering terjadi kendala, di antaranya:

- 1) Sinkronisasi antara renja SKPD dengan capaian Visi Misi Pemerintah Daerah melalui indikator kinerja sangatlah lemah.
- 2) Penyusunan renja yang bersifat manual, kurang efisien, karena memakan waktu yang relatif lama.
- 3) Pengendalian terhadap penyusunan perencanaan pembangunan sulit untuk dilakukan.

Oleh karena itu, dalam proses perencanaan pembangunan dengan berbasis web seperti SIPPD ini, sangat memudahkan seluruh admin yang ada pada setiap SKPD untuk menginput rencana kerja tahunan, KUA PPAS, dan sebagai fasilitas kemudahan untuk mengontrol kinerja SKPD dalam menginput program, kegiatan, dan target serta anggaran yang akan digunakan selama satu (1) tahun berjalan. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini sebagai ukuran untuk melihat perbedaan sebelum dan sesudah menggunakan SIPPD dalam Kajian Tentang Fungsi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah ada 3 yaitu :

- 1) Musrenbang, artinya adanya perbedaan sebelum dan sesudah penggunaan SIPPD terhadap jumlah usulan yang ditindaklanjuti.
- 2) KUA PPAS, artinya adanya perbedaan sebelum dan sesudah penggunaan SIPPD terhadap persentase konsistensi program dan kegiatan yang direncanakan.
- 3) Monev, artinya adanya perbedaan sebelum dan sesudah penggunaan SIPPD terhadap prosentase program dan kegiatan yang terevaluasi.

METODE

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yaitu penelitian tentang data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk angka-angka, meskipun juga berupa data kualitatif sebagai pendukungnya, seperti kata-kata atau kalimat yang tersusun dalam angket, kalimat hasil konsultasi atau wawancara antara peneliti dan informan.

Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Data kualitatif yang diangkakan misalnya terdapat dalam skala pengukuran (Sugiyono, 2002). Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Poso tepatnya di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).

Populasi yang penulis gunakan sebagai objek penelitian adalah seluruh Kasubbag Perencanaan Program yang tersebar pada seluruh SKPD yakni jumlah keseluruhan dari populasi adalah 43 (empat puluh tiga) orang sesuai dengan jumlah SKPD yang ada.

Penetapan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode sampel jenuh, yaitu suatu teknik penentuan sampel yang dilakukan dengan mengambil seluruh jumlah populasi.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan uji beda/ (*T-Test*) agar dapat diketahui ada atau tidaknya perbedaan terhadap jumlah usulan yang ditindaklanjuti, prosentase konsistensi program dan kegiatan yang direncanakan, dan prosentase program dan kegiatan yang terevaluasi sebelum dan sesudah adanya program SIPPD dengan menggunakan rumus statistic parametric uji beda (sampel berpasangan):

$$t_{hitung} = \frac{d}{s/\sqrt{n}}$$

Keterangan :

d = rerata selisih nilai 1 dan 2 (pre dan post)

S = Simpangan baku selisih (beda) nilai yang dapat di hitung dengan :

$$S = \frac{\sqrt{n \sum di^2 - (\sum di)^2}}{n \cdot (n - 1)}$$

Keterangan :

di = Beda pengamatan pasangan yang ke i

n = ukuran atau besar sampel.

Kaidah pengambilan keputusan dari pengujian ini dapat ditentukan sebagai berikut:

- apabila t hitung (t_h) \geq dari t tabel (t_t), maka pada level *convidence* 95% terbukti bahwa indikator akurat, tepat waktu, relevan, dan lengkap berbeda signifikan antara sebelum dan sesudah adanya program SIPPD.
- apabila t hitung (t_h) \leq dari t tabel maka pada level *convidence* 95% terbukti bahwa indikator akurat, tepat waktu, relevan, dan lengkap tidak berbeda signifikan antara sebelum dan sesudah adanya program SIPPD.

Peneliti mengolah data penelitian dengan menggunakan bantuan program *SPSS For Windows Release 16.0*

Untuk analisis data kualitatif menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman (Moleong, 2005) dengan prosedur reduksi data, penyajian data dan

menarik kesimpulan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Reduksi Data yaitu: dengan menajamkan, menggolongkan, membuang sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.
- 2) *Display Data* yaitu: berupa sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian data dapat dipahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan.
- 3) Menarik Kesimpulan/verifikasi dilakukan secara longgar, tetapi terbuka dan dirumuskan secara rinci dan mengakar dengan kokoh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan sebelum dan sesudah penggunaan SIPPD dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini:

Tabel 1. Analisis Statistik Uji Beda Dua Sampel Perbedaan Sebelum dan Sesudah Penggunaan SIPPD

Variabel	T _{hitung}	T _{tabel}	Sig	Alpha (α)	Keterangan
Jumlah usulan yg ditindak lanjuti	3,954	2,018	0,002	0,05	Berbeda
Presentase Konsistensi Program dan Kegiatan yang direncanakan	12,610	2,018	0,000	0,05	Berbeda
Presentase Program dan Kegiatan yang terevaluasi	17,048	2,018	0,000	0,05	Berbeda

Sumber : Data Primer 2015 (data diolah berdasarkan hasil wawancara)

Uraian tabel tersebut di atas merupakan nilai banding antara t hitung dan t tabel serta perbandingan antara nilai alpha dengan tingkat signifikansi dengan tingkat kepercayaan sebesar 95% sehingga dapat diketahui adanya perbedaan yang signifikan atau tidak terhadap keadaan sebelum atau sesudah penggunaan SIPPD

Uji Beda Dua Sampel Perbedaan Sebelum dan Sesudah Penggunaan SIPPD

A. Jumlah Usulan Yang Ditindaklanjuti

Analisis uji beda menunjukkan bahwa variabel jumlah usulan yang ditindaklanjuti memiliki nilai t hitung sebesar 3,954 lebih dari nilai t tabel 2,018 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,002 yang nilainya kurang dari nilai α sebesar 0,05 dengan

tingkat kepercayaan sebesar 95%. Hasil ini membuktikan bahwa ada perbedaan yang signifikan terhadap jumlah usulan yang ditindaklanjuti sebelum dan sesudah adanya penggunaan SIPPD. Hal ini dipertajam oleh Purnama Megati (Kepala BAPPEDA Kabupaten Poso) dalam hasil wawancara sebagai berikut :

“Pelaksanaan Musrenbang merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, berbagai tahapan harus dilalui sesuai dengan regulasi yang ada, yaitu dengan mekanisme teknokratik, partisipatif, top down dan bottom up”. Ini penting untuk diperhatikan mengenai sinkronisasi program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat dengan rencana kerja SKPD, kadangkala masih ditemui berbagai program dan kegiatan yang belum sinkron, untuk itu, dengan adanya SIPPD ini, dirasakan sangat membantu serta mampu memberikan dampak nyata dalam upaya sinkronisasi antara rencana kerja SKPD dengan usulan masyarakat. Berdasarkan data yang ada, terjadi peningkatan jumlah usulan yang ditindaklanjuti setelah adanya penggunaan SIPPD, ini membuktikan bahwa dengan adanya sistem ini, proses perencanaan dapat lebih baik dan koneksitas antara yang diusulkan dengan program kegiatan SKPD bisa selaras”.

Penggunaan SIPPD memberikan dampak nyata dalam menindaklanjuti usulan masyarakat karena secara sistematis telah adanya form khusus yang disajikan secara online dan menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan khususnya.

B. Presentase Konsistensi Program dan Kegiatan yang direncanakan

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel presentase konsistensi program dan kegiatan yang direncanakan memiliki nilai t hitung sebesar 12,610 lebih dari nilai t tabel sebesar 2,018 dengan tingkat signifikansi

0,000 yang nilainya kurang dari nilai α sebesar 0,05 dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%. Hal ini membuktikan bahwa ada perbedaan yang kuat dan signifikan antara presentase konsistensi program dan kegiatan yang direncanakan sebelum dan sesudah adanya penggunaan SIPPD. Perbedaan ini terlihat pada nilai presentase antara sebelum dan sesudah penggunaan SIPPD.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Purnama Megati, (Kepala BAPPEDA Kabupaten Poso) diperoleh keterangan sebagai berikut :

“Kebijakan Umum Anggaran dan Penetapan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) sebagaimana telah kita ketahui bersama adalah merupakan bentuk kesepakatan antara eksekutif dengan legislatif terhadap program dan kegiatan yang direncanakan oleh SKPD serta berbagai catatan dan pokok-pokok pikiran DPRD yang telah diakomodir saat pelaksanaan Musrenbang, tentunya dalam kegiatan ini konsistensi antara program dan kegiatan yang sebelumnya telah termuat dalam renja SKPD serta dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sangat perlu diperhatikan, karena jika ada perbedaan program dan kegiatan yang direncanakan dan disepakati akan menimbulkan inkonsistensi sehingga berpengaruh terhadap penganggaran, kinerja SKPD, target yang telah ditetapkan dan indikator kinerja SKPD, oleh karena itu, dengan adanya SIPPD, hal ini dapat diantisipasi karena penyusunan renja SKPD dan KUA PPAS telah menggunakan sistem yang terintegrasi satu dengan lainnya untuk menjaga konsistensi antara program dan kegiatan serta anggaran dalam renja SKPD dengan apa yang termuat didalam KUA PPAS.”

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa peranan SIPPD tersebut sangat signifikan terhadap presentase konsistensi program dan kegiatan yang direncanakan sehingga dapat menghindari

terjadinya inkonsistensi antara dokumen rencana pembangunan serta mampu menjembatani antara perencanaan dan penganggaran.

C. Presentase Program dan Kegiatan Yang Terevaluasi

Hasil analisis menunjukkan bahwa presentase program dan kegiatan yang terevaluasi memiliki nilai t hitung sebesar 17.048, lebih dari t tabel 2,018 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang nilainya kurang dari nilai α sebesar 0,05 dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%. Hasil ini memberikan pemahaman bahwa adanya perbedaan yang kuat terhadap presentase program dan kegiatan yang terevaluasi sebelum dan sesudah penggunaan SIPPD. Purnama Megati memperkuat analisis ini dengan petikan wawancara sebagai berikut :

“Kegiatan pengendalian terhadap rencana pembangunan melingkupi pengendalian terhadap kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan dengan tujuan untuk menjaga agar kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan .tetap on the track, sedangkan evaluasi menurut regulasi yang berlaku adalah melihat apakah hasil pelaksanaan sesuai dengan perencanaan, melihat efisiensi penggunaan dana serta efektifnya program dan kegiatan yang dilaksanakan, mengukur capaian dari indikator kinerja dari target yang telah ditetapkan sehingga dapat berasumsi untuk kelanjutan program dan kegiatan tersebut. Sejauh ini sebelum menggunakan SIPPD hal ini sangat sulit untuk dilakukan, padahal kita ketahui bersama melaksanakan pengendalian dan evaluasi itu bukanlah hal yang mudah apalagi masih dilakukan secara manual, sehingga dengan adanya SIPPD ini, kita dapat melakukan pengendalian antara perencanaan dan pelaksanaan serta evaluasi berbagai program dan kegiatan SKPD secara online dan terintegrasi satu dengan yang lainnya, data base SKPD yang menjadi

dasar pengukuran tentunya telah terkunci sejak menyusun RPJMD agar capaian pelaksanaan program dan kegiatan setiap triwulan dan tahunnya dapat terukur dengan baik sehingga bisa menjadi solusi terhadap efektifnya kegiatan evaluasi dan sebagai referensi untuk menyusun perencanaan di tahun berikutnya”.

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa setelah adanya SIPPD, fungsi pengendalian telah berjalan dengan baik serta mengefektifkan evaluasi terhadap capaian kinerja SKPD, memudahkan kontrol antara perencanaan dan pelaksanaan dengan tujuan agar konsistensi perencanaan dan pelaksanaan tetap terjaga.

Secara umum, berdasarkan hasil uji beda ini, menerangkan bahwa seluruh variabel yang digunakan, memiliki perbedaan setelah adanya penggunaan SIPPD. Untuk jumlah usulan yang ditindaklanjuti, misalnya dapat meningkat karena telah sinkron antara rencana kerja SKPD dengan usulan masyarakat saat musrenbang. Untuk presentase konsistensi program dan kegiatan yang direncanakan juga telah mengalami peningkatan, misalnya dalam menyusun KUA PPAS telah menggunakan sistem sehingga program dan kegiatan yang telah diinput dalam renja SKPD telah terkoneksi secara otomatis sebagai dasar untuk menyusun KUA PPAS. Untuk presentase program dan kegiatan yang terevaluasi juga mengalami peningkatan ini dapat dirasakan saat melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Renja dan RKPD sesuai dengan format pengendalian dan evaluasi yang termuat dalam regulasi, dimana SKPD bisa langsung mengisi secara *online* realisasi dari target indikator kinerja dan admin BAPPEDA dapat memonitor langsung sehingga menjadi bahan pelaporan sebagai informasi hasil pelaksanaan dari perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) sangat

membantu dalam menjalani proses perencanaan hingga evaluasi pembangunan. Kondisi sebelumnya, untuk menindaklanjuti usulan musrenbang, menyusun program dan kegiatan, rencana kerja SKPD dan KUA PPAS-, serta melakukan pengendalian dan evaluasi sangat sulit dan mengalami berbagai kendala, setelah menggunakan SIPPD semua telah tersusun di dalam sistem, waktu penyusunan lebih efisien dan konsistensi data tetap terjaga. Sehingga tampak adanya perbedaan yang cukup signifikan saat sebelum menggunakan dengan setelah menggunakan SIPPD.

Perencanaan pembangunan yang sudah menggunakan sistem ini perlu dipelihara dan berkelanjutan agar setiap tahapan perencanaan pembangunan dapat dilakukan dengan baik, penggunaan SIPPD yang terkoneksi dan terintegrasi sangat memudahkan aparat perencana dan pihak BAPPEDA dalam menyusun berbagai dokumen perencanaan pembangunan, jika memungkinkan perlu dilakukan pengembangan sistem sesuai dengan kebutuhan dan regulasi agar pihak perencana dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, menjaga konsistensi antar dokumen serta sesuai dengan regulasi dan dapat mengatasi berbagai kendala yang dihadapi.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti kemukakan, maka kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Penerapan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) sangat membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Poso dalam proses perencanaan pembangunan serta menyediakan dokumen perencanaan secara cepat, akurat dan berkualitas.
2. Dari analisis uji beda dan hasil wawancara yang dilakukan, terdapat perbedaan yaitu sebelum penggunaan

SIPPD, proses perencanaan pembangunan belum berjalan optimal, dan setelah penggunaan SIPPD, mengalami perubahan sehingga mampu menjalankan berbagai proses perencanaan pembangunan dengan baik.

Rekomendasi

1. Perlunya pengembangan sistem yang sesuai dengan kebutuhan sehingga bisa memudahkan penyusunan dokumen rencana pembangunan.
2. Penting bagi setiap instansi mengalokasikan anggaran untuk peningkatan kapasitas admin pengelola SIPPD serta memberikan konsekuensi biaya sebagai motivasi dalam menjalankan pekerjaannya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih yang setulus-tulusnya kepada yang terhormat Bapak Dr. Haerul Anam.S.E.,M.Si selaku Ketua Tim Pembimbing dan Bapak Moh. Ahlis Djirimu.,DEA.,Ph.D. selaku Anggota Tim Pembimbing, yang telah banyak memberikan perhatian, bimbingan dan arahan kepada penulis sejak perencanaan penelitian sampai penulisan tesis dimana artikel ini di ambil.

DAFTAR RUJUKAN

- Abe, Alexander. 2001. *Perencanaan Daerah Memperkuat Prakarsa Rakyat Dalam Otonomi Daerah*. Lappera Pustaka Utama: Yogyakarta.
- Arsyad L. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Daerah*. edisi pertama. BPFE: Yogyakarta.
- <http://bappeda.bonebolango.org/produk-9-sistem-informasi-perencanaan-pembangunan-daerah.html>

Moloeng, Lexy. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya: Bandung.

Sugiyono. 2002. *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta: Bandung.

UU No. 25 tahun 2004 *tentang* Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional